

Analisis Kebutuhan Pelayanan Sosial bagi Keluarga Nelayan Miskin

Analysis on the Need of Social Service of Poor Fishermen Families

Chatarina Rusmiyati¹ dan Akhmad Purnama²

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Sosial (B2P3KS). Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Yogyakarta. Telpn (0274) 377265. HP. Email: ¹) 08562870070. E-mail: cathy.mami@yahoo.com. ²) 08562916852. E-mail: akhmadpurnama19@gmail.com. Diterima 5 April 2016, diperbaiki 10 Juni 2016, disetujui 1 September 2016.

Abstract

Indonesian inhabitants who live along seashores still depends their lives on fishery. Fishermen are like a group of poor people living in slum areas along the coast and it is difficult to achieve welfare society. The study meant to know and analyse the need of social service for poor fishermen family. The study was held in Padang Pariaman Regency, West Sumatera Province, subjects of the study were 30 poor fishermen families and field guidance official. Data were analysed through qualitative-descriptive technique. The study found that poor fishermen families condition in Padang Pariaman were low income, under regional minimum wage Rp 1.630.000,- with members of the family they have to support more than three people. The educational background was also low, primary school or its equivalent. The majority have the houses descended from their parents, some living with their parents or parents in law. House conditions some permanent and some semipermanent. The majority benefited health care to local central community health care and some to private doctors and assistants. They ate enough, three and two times daily. Social and guidance services they needed, sort of training and motivating to enhance knowledge, reference, and to grow sense of entrepreneurship; Monetary management elucidation to manage families fund including saving habit, and capital assistance and guidance so that fishermen courage to put up capital to develop their business. The Ministry of social Affairs should optimize the role of social to give social guidance and service to help enhance fishermen lives quality, motivate and give skill supplement on fishermen and their families so that their welfare quality raising.

Keywords: *need analysis; social service; poor fishermen families*

Abstrak

Penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pesisir pantai, masih menggantungkan hidup menjadi nelayan. Nelayan ibarat sekelompok masyarakat miskin tinggal di wilayah kumuh pinggiran pantai, dan sulit untuk bisa mewujudkan menjadi masyarakat sejahtera. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebutuhan pelayanan sosial bagi keluarga nelayan miskin. Kajian dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman, subjek 30 keluarga nelayan miskin dan petugas penyuluh lapangan yang mendampingi nelayan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kondisi keluarga nelayan miskin di Padang Pariaman memiliki pendapatan rendah di bawah upah minimum regional kabupaten Rp 1.630.000,-, dengan jumlah tanggungan lebih dari tiga orang. Tingkat pendidikan rendah yaitu SD/ sederajatnya. Sebagian besar memiliki rumah diperoleh dari warisan orang tua dan ada yang menumpang di rumah orang tua atau mertua. Kondisi rumah sebagian permanen dan sebagian semi permanen. Berkait layanan kesehatan, ketika sebagian besar memanfaatkan fasilitas puskesmas, sebagian berobat ke dokter umum atau mantri kesehatan. Kebutuhan makan cukup terpenuhi, ada yang makan tiga kali sehari dan ada yang dua kali sehari. Pelayanan dan pendampingan sosial yang dibutuhkan nelayan miskin antara lain pelatihan dan motivasi guna menambah wawasan, pengetahuan, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan; Penyuluhan manajemen keuangan agar dapat mengelola keuangan keluarga termasuk membiasakan menabung; serta pemberian bantuan modal dan pendampingan agar nelayan berani menambah modal untuk mengembangkan usaha. Kementerian Sosial agar lebih mengoptimalkan peran penyuluh sosial dalam memberi pendampingan dan pelayanan sosial yang bisa membantu meningkatkan kualitas hidup nelayan, memotivasi dan memberi tambahan keterampilan bagi nelayan dan keluarganya agar kualitas dan kesejahteraan hidup mereka meningkat.

Kata kunci: *analisis kebutuhan; pelayanan sosial; keluarga nelayan miskin*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau tersebar di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Kondisi ini mengakibatkan banyak warga negara Indonesia tinggal di daerah pesisir pantai dan mengandalkan hidupnya sebagai nelayan. Nelayan sering disebut sebagai masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat miskin subsistem (*the poorest of the poor*) dan merupakan salah satu bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah (Kusnadi, 2002). Sungguh sangat ironis, sebagai sebuah negara maritim seperti Indonesia, di tengah kekayaan laut yang begitu besar masyarakat nelayan merupakan golongan masyarakat yang paling miskin. Pemandangan yang sering dijumpai di perkampungan nelayan adalah lingkungan hidup yang kumuh dengan rumah-rumah yang sangat sederhana, walaupun ada rumah yang menunjukkan tanda kemakmuran (misalnya rumah megah dan memiliki antena parabola), umumnya dipunyai oleh pemilik kapal, pemodal, atau rentenir yang jumlahnya tidak signifikan dan sumbangannya kepada kesejahteraan komunitas sangat tergantung kepada individu bersangkutan.

Berdasarkan data *World Bank* mengenai kemiskinan, bahwa 108,78 juta orang atau 49 persen dari total penduduk Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Badan Pusat Statistik (BPS), dengan perhitungan berbeda dari Bank Dunia, mengumumkan angka kemiskinan di Indonesia 34,96 juta orang (15,42 persen). Angka tersebut diperoleh berdasarkan ukuran garis kemiskinan pendapatan \$ 1,55 dolar AS. Sebagian besar (63,47 persen) penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pesisir dan perdesaan (BPS, 2008). Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi. Ada beberapa akar masalah yang dapat menjadi penyebab terjadinya kemiskinan nelayan, antara lain kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek bukan subjek. Kondisi bergantung

pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan (Suharto, 2005).

Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah kebiasaan atau pola hidup. Pada dasarnya nelayan bukan tipe manusia pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan selalu bekerja keras. Namun kendalanya adalah pola hidup konsumtif, pada saat penghasilan banyak dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan konsumtif dan tidak ditabung untuk persiapan apabila paceklik. Ketika terjadi paceklik, mereka berhutang, termasuk kepada lintah darat, kondisi ini semakin memperberat kehidupan nelayan. Gambaran tersebut merupakan pusaran masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan umumnya di Indonesia (Rahmattullah, 2010).

Kondisi seperti permukiman kumuh, tingkat pendapatan dan pendidikan rendah, ketidakberdayaan terhadap intervensi pemodal, penguasa yang datang, serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tidak pro-nelayan melekat erat pada kehidupan nelayan Indonesia. Banyak sekali kasus nelayan miskin di wilayah Indonesia, yang diangkat dalam berbagai tulisan dan penelitian. Salah satu contoh penelitian Mubyarto (1984), yang menganalisis perekonomian masyarakat nelayan miskin di Jepara. Menurut Mubyarto dkk, kemiskinan nelayan lebih banyak disebabkan oleh adanya tekanan struktur, yaitu nelayan terbagi atas kelompok kaya dan kaya sekali di satu pihak, miskin dan miskin sekali di lain pihak, ada dominasi dan eksploitasi dari nelayan kaya terhadap nelayan miskin.

Penelitian lain Mubyarto dan Sutrisno (1988) juga melihat kemiskinan nelayan di Kepulauan Riau. Menurut Mubyarto dkk, kemiskinan nelayan lebih banyak disebabkan oleh adanya tekanan struktur, yaitu nelayan kaya dan penguasa

yang menekan nelayan miskin. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya ketidakberdayaan nelayan miskin terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di tiap-tiap daerah, mengakibatkan kemiskinan semakin menjadi-jadi dan menekan mereka untuk tetap hidup di dalam garis kemiskinan.

Berbagai kebijakan sosial dikeluarkan pemerintah sebagai upaya penanganan kemiskinan bagi nelayan, melalui proses koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga semua kebijakan dijalankan sesuai dengan yang dibutuhkan dan berdampak positif bagi kemajuan masyarakat sasaran. Kebijakan sosial dapat dimaknai sebagai ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespons isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak termasuk masalah nelayan beserta kemiskinannya. Kebijakan sosial menunjuk pada yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program tunjangan sosial (Suharto, 2007). Bagi pemerintah, keterpaduan keahlian dan pengetahuan dalam merumuskan berbagai kebijakan yang terealisasi dalam sebuah program harus didukung berbagai disiplin ilmu pengetahuan, tujuannya agar perencanaan yang disusun sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat nelayan. Kemiskinan nelayan tidak mampu ditangani secara kelembagaan oleh sektor kelautan dan perikanan saja, tetapi multi sektor pusat ke daerah.

Pelayanan sosial dapat dipahami sebagai suatu aktivitas terorganisasi yang bertujuan untuk menolong orang agar terdapat penyesuaian timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya. Fungsi pelayanan sosial adalah untuk peningkatan kondisi kehidupan masyarakat, pengembangan sumber manusiawi, orientasi masyarakat terhadap perubahan dan penyesuaian sosial, mobilisasi dan pencipta sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan serta penyediaan dan penyelenggaraan struktur

kelembagaan agar pelayanan terorganisasi dapat berfungsi (Dwi Heru Sukoco, 1991).

Pemecahan masalah nelayan miskin perlu didasari pengetahuan tentang akar permasalahan sesungguhnya, sehingga kebijakan yang dibuat bersifat komprehensif. Kegagalan penanganan kemiskinan nelayan di samping kurang adanya keterpaduan, juga terdapat berbagai kelemahan dalam perencanaan yang akhirnya tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu wilayah pesisir pantai, sebagian besar penduduknya mengandalkan hidup dari hasil laut. Banyak nelayan (di wilayah tersebut yang tergolong miskin dan membutuhkan campur tangan berbagai pihak agar kesejahteraan hidupnya semakin meningkat (Iriani, 2001). Berpijak pada kondisi tersebut, menarik untuk dilakukan kajian terkait analisis kebutuhan pelayanan sosial nelayan miskin, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Masalah yang hendak dicari jawabannya dalam kajian ini adalah apa saja pelayanan sosial yang dibutuhkan keluarga nelayan miskin di Kabupaten Padang Pariaman?

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang didefinisikan sebagai satu cara sederhana, sangat longgar, yaitu suatu penelitian interpretatif terhadap suatu masalah, peneliti merupakan sentral dari pengertian atau pemaknaan yang dibuat terhadap suatu masalah. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami objek, tidak menemukan hukum-hukum, tidak untuk membuat generalisasi, melainkan membuat ekstrapolasi (Asmadi Alsa, 2007). Lokasi penelitian di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan kondisinya miskin.

Sumber data penelitian adalah keluarga nelayan miskin, baik suami atau isteri berjumlah 30 orang dan seorang petugas penyuluh lapangan (PPL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendampingi nelayan. Pengumpulan data

dengan wawancara, menggunakan panduan, dan observasi. Wawancara terhadap keluarga nelayan miskin untuk mengungkap latar belakang kehidupan, dan pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh nelayan miskin. Wawancara terhadap informan dari PPL untuk mengungkap tugas penyuluhan dan pendampingan yang diberikan kepada keluarga nelayan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan prosedur: Mengumpulkan data yang berwujud kata-kata (misalnya hasil wawancara dari partisipan selama wawancara); Menganalisis kata-kata tersebut melalui pendeskripsian peristiwa dan menetapkan tema; Mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum dan luas; Tidak membuat prediksi terhadap yang diamati, tetapi menyadarkan diri pada peneliti untuk merangkum yang mereka laporkan dalam laporan tertulis (Bogdan & Bilken dalam Asmadi Alsa, 2007). Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Proses analisis data melalui tahapan reduksi data, display data, menarik kesimpulan serta melakukan verifikasi data melalui proses penafsiran dan pemaknaan data (Moleong, 2010).

C. Kondisi Nelayan Miskin di Padang Pariaman

Deskripsi Wilayah: Kabupaten Padang Pariaman merupakan satu di antara 19 daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,79 km² dengan panjang garis pantai 60,50 km membentang hingga wilayah gususan Bukit Barisan yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia, mempunyai dua pulau yaitu Pulau Pieh dan Bando. Sebagai wilayah pesisir, Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar, berbatasan dengan Kota Pariaman yang terletak di tengah Kabupaten Padang Pariaman dan berbatasan dengan Kabupaten Agam di sebelah utara, Kota Padang di sebelah selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar di sebelah timur dan di sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Secara administratif Kabupaten Padang Pariaman terdiri atas 17 kecamatan dan 60 nagari serta 461 Korong. Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan, menggantikan istilah desa yang digunakan di provinsi lain di Indonesia termasuk di Sumatera Barat. Nagari terdiri dari beberapa korong yaitu pembagian wilayah berdasar gelar yang diberikan kepada pemimpin sebuah suku atau korong di wilayah dengan populasi etnis Melayu atau Minangkabau. Kabupaten Padang Pariaman merupakan satu di antara tujuh Kabupaten dan Kota di wilayah pesisir Sumatera Barat, memiliki jumlah penduduk 397.062 jiwa, 152.501 jiwa tinggal di wilayah pesisir, tersebar pada enam kecamatan pesisir yang secara umum memiliki mata pencaharian sebagai petani, pedagang, nelayan, pengolah hasil perikanan, pemasar hasil perikanan. Jumlah nelayan yang tinggal di wilayah pesisir Kabupaten Padang Pariaman 4.081 orang. Sebelum tahun 2010, umumnya nelayan Kabupaten Padang Pariaman masih menggunakan perahu layar dalam usaha menangkap ikan di laut. Dengan menggunakan teknologi perahu layar, hasil tangkapan jumlahnya terbatas karena hanya bisa beroperasi pada zona penangkapan satu hingga dua mil. Namun dengan ditetapkan program modernisasi armada dan alat penangkapan ikan, nelayan berangsur-angsur mengganti penggunaan perahu layar dengan mesin robin dan mesin tempel, sehingga jangkauan operasi penangkapan menjadi lebih jauh. Kondisi ini diharapkan akan berkorelasi positif terhadap peningkatan hasil tangkapan ikan oleh nelayan dan tentu saja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan. Gambaran umum kondisi keluarga nelayan miskin berkaitan dengan pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan, pekerjaan isteri, kepemilikan dan kondisi rumah, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan makan keluarga.

Pendapatan: Pekerjaan sebagai nelayan merupakan pekerjaan yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan fisik. Nelayan Padang Pariaman bekerja di laut selalu bergelut dengan

ketidakpastian penghasilan sebagai akibat dari anomali musim dan cuaca yang berubah-ubah serta kurang bersahabat. Peralatan tangkap yang masih tradisional dan sebagian besar berstatus nelayan buruh sangat tergantung pada juragan, memberi kontribusi pada perolehan keuntungan yang kecil. Pendapatan dari mencari ikan dengan peralatan sederhana dan ketergantungan pada juragan merupakan salah satu persoalan mendasar nelayan miskin di Padang Pariaman, tidak mengherankan apabila penghasilan mereka rerata di bawah upah minimum Kabupaten (UMK) Padang Pariaman. Tabel 1 berikut mendeskripsikan kondisi pendapatan rerata nelayan dalam satu bulan.

Tabel 1
Konfigurasi Pendapatan Rerata Responden
Setiap Bulan

No	Pendapatan	F	persen
1	< Rp 500.000	6	20,00
2	Rp 500.000-Rp.1.000.000	12	40,00
3	Rp 1.000.001-Rp. 1.500.000	9	30,00
4	Rp 1.500.001-Rp. 2.000.000	1	3,33
5	Rp 2.000.001 ke atas	2	6,67
Jumlah		30	100,00

Sumber: Jawaban responden 2015 (N=30)

Data pada tabel menunjukkan bahwa mayoritas nelayan di Padang Pariaman (90 persen) memiliki pendapatan dibawah Rp 1.500.000,-. Apabila dilihat dari upah minimal Kabupaten Padang Pariaman Rp 1.630.000,-, maka sebagian besar nelayan di daerah tersebut memiliki pendapatan di bawah upah minimum regional kabupaten. Secara keseluruhan rerata pendapatan nelayan tidak lebih dari Rp 914.166,- setiap bulan. Rendahnya pendapatan tersebut mengakibatkan keluarga nelayan hidup dalam kondisi serba berkekurangan bahkan miskin. Kondisi ini semakin diperparah ketika terjadi krisis eksternal seperti terjadinya perubahan musim, cuaca buruk dan potensi ikan yang semakin langka. Nelayan di Kabupaten Padang Pariaman sangat tergantung pada musim ikan, tidak memiliki keahlian lain, dan masih rendahnya kemampuan

dalam memanfaatkan peluang usaha termasuk budidaya hasil laut.

Pendapatan nelayan yang terbatas hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka menyisihkan uang untuk menabung. Ada ketidakpastian penghasilan bagi nelayan karena jam kerja yang harus mengikuti siklus bulan, yaitu dalam 30 hari satu bulan, yang dapat dimanfaatkan untuk melaut hanya 20 hari efektif. Apabila dihitung dalam satu tahun mereka melaut selama sembilan bulan, sisa waktu lainnya umumnya menganggur. Rata-rata penghasilan minimal nelayan antara Rp 20.000,- hingga Rp 40.000,-. Apabila cuaca kurang bersahabat, terkadang mereka sama sekali tidak mendapatkan penghasilan. Namun bisa saja terjadi hasil tangkapan melimpah sehingga hasilnya berlebih dan tidak laku di pasaran. Kondisi ini akan berbeda apabila nelayan mempunyai keterampilan atau usaha lain, sehingga di waktu tidak melaut mereka tetap memiliki penghasilan tambahan.

Sejalan dengan hasil penelitian Sujarno (2008), bahwa peningkatan pendapatan nelayan dipengaruhi oleh modal kerja, jumlah tenaga kerja, pengalaman dan jarak tempuh melaut. Modal kerja mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan nelayan, apabila modal kerja naik akan meningkatkan pendapatan nelayan, begitu juga dengan tenaga kerja, pengalaman, dan jarak tempuh melaut juga mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan nelayan. Oleh karena itu, pendapatan nelayan mengalami peningkatan apabila didukung adanya modal kerja, jumlah tenaga kerja, pengalaman menjadi nelayan dan jarak tempuh yang dibutuhkan nelayan ketika berada di tengah laut.

Jumlah Tanggungan Keluarga: Keluarga nelayan di Padang Pariaman mayoritas memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 3 orang dalam satu rumah, bahkan ada beberapa keluarga tinggal bersama anak yang sudah menikah dan mempunyai KK sendiri. Terkait jumlah tanggungan keluarga secara lengkap tersaji dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2
Jumlah Tanggungan Keluarga

No	Jumlah Tanggungan (orang)	f	persen
1	1 – 3	7	23,33
2	4 – 6	18	60,00
3	7 – 9	3	10,00
4	≥ 10	2	6,67
Jumlah		30	100.00

Sumber: Jawaban responden (N=30)

Terlihat bahwa jumlah terbanyak tanggungan keluarga responden dalam satu keluarga antara empat hingga enam orang, yaitu ada 18 orang (60 persen) yang menyatakan demikian. Sebanyak tujuh orang (23,33 persen) memiliki tanggungan keluarga satu hingga tiga orang dan lima orang lainnya memiliki tanggungan keluarga lebih dari tujuh orang.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa keluarga nelayan di lokasi penelitian rata-rata memiliki jumlah tanggungan tergolong cukup banyak. Hasil wawancara lebih lanjut dengan responden terungkap bahwa memang dijumpai banyak keluarga muda setelah menikah masih tetap tinggal di rumah orang tua atau ikut mertuanya. Hal tersebut dikarenakan mereka belum memiliki rumah sendiri sehingga terpaksa tinggal bersama orang tua atau mertuanya. Kondisi ini bisa terjadi baik bagi anak laki-laki maupun perempuan, karena ada responden yang ikut istrinya, tinggal bersama mertua dan ikut membantu bekerja menjadi nelayan.

Apabila dikaji lebih mendalam, jumlah tanggungan keluarga dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi penyebab kemiskinan nelayan mengingat terdapat ketimpangan antara pendapatan nelayan dengan banyaknya jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan modal dan ketidakmampuan mengakses modal usaha, misalnya dalam pengajuan kredit usaha nelayan untuk mengembangkan diversifikasi hasil kelautan dan non kelautan, khususnya ketika menghadapi datangnya musim paceklik untuk memperkecil ketergantungan pada musim penangkapan.

Pendidikan: Data terkait tingkat pendidikan responden dapat dilihat dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3
Pendidikan Nelayan

No	Pendidikan	F	persen
1	SD/Sederajat	16	53,3
2	SMP/Sederajat	6	20,00
3	SMA/Sederajat	5	16,7
4	D3/PT	3	10
Jumlah		30	100

Sumber: Jawaban responden (N=30)

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat pendidikan responden nelayan dapat dikatakan masih rendah karena separuh lebih responden hanya berpendidikan sampai tingkat SD/Sederajat yaitu sebanyak 16 orang atau 53,3 persen. Enam orang (20 persen) nelayan responden memiliki pendidikan hingga ke tingkat SLTP. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa tingkat pendidikan nelayan sangat rendah. Hasil wawancara mendalam dengan beberapa nelayan terungkap bahwa karena tuntutan kehidupan yang keras, mereka lebih memilih pergi melaut daripada ke sekolah. Pendidikan yang rendah menjadi penyebab kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang lebih maju. Nelayan di Padang Pariaman umumnya adalah nelayan tradisional yang mengandalkan perahu-perahu kecil dengan mesin sederhana, dengan peralatan seadanya tentu saja hasil tangkapan juga terbatas, sehingga pendapatan nelayan sangat minim. Kalau pun ada nelayan yang berpendidikan SMA, jumlahnya hanya lima orang (16,7 persen).

Hasil wawancara lebih lanjut dengan salah satu responden yang berpendidikan SMA, diperoleh informasi bahwa meskipun pada awalnya mereka nelayan miskin, tetapi berkat kegigihan dan keuletannya memperoleh kesempatan mendapat pelatihan bidang kelautan di Jepang. Hasil pelatihan tersebut menjadi bekal pengetahuan yang kemudian dikembangkan dan berbekal pengalaman tersebut akhirnya berhasil menjadi nelayan yang lebih maju. Responden ini menjadi juragan nelayan dan menjadi ketua salah

satu kelompok nelayan di daerah Sungai Limau. Sisanya, ada tiga responden nelayan (10 persen) yang berpendidikan D3, mereka bekerja sebagai nelayan karena memang tidak memperoleh pekerjaan lain, secara kebetulan orang tuanya juga nelayan sehingga mereka sudah terbiasa dengan kehidupan sebagai nelayan dan akhirnya ikut menjadi nelayan juga, responden ini memiliki pekerjaan sampingan, beternak.

Rendahnya tingkat pendidikan di kalangan keluarga nelayan, menjadi suatu pembelajaran yang berharga sehingga mereka memiliki cita-cita agar anaknya bisa bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut diungkap salah satu responden yang memiliki keinginan agar anak-anak mereka bisa memperoleh pendidikan lebih tinggi, *sokor-sokor* bisa menjadi seorang sarjana. Mereka mendorong anaknya agar bisa duduk di bangku kuliah, ada dua responden yang bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Harapan mereka apabila anak-anak bersekolah tinggi, menjadi sarjana, akan memiliki pengetahuan yang cukup sehingga bisa berkompetisi dan memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Hal tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Badiran (2009), bahwa baik nelayan modern maupun tradisonal dan buruh nelayan, menginginkan anaknya bersekolah. Masyarakat nelayan sebenarnya berkeinginan agar anaknya sekolah, tetapi dengan kondisi yang pas-pasan dan terkadang karena kebutuhan hidup, akhirnya anak nelayan menjadi *drop out* dan tidak sekolah lagi.

Pekerjaan Istri: Keluarga nelayan di Kabupaten Padang Pariaman sebagian besar hidup dengan serba kekurangan dan tergolong masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kemudian tidak mengandalkan penghasilan dari nelayan saja. Beberapa responden mencari tambahan pekerjaan sebagai upaya untuk menambah penghasilan keluarga, sehingga dapat sedikit membantu menopang kebutuhan hidup keluarga ketika terjadi musim paceklik karena lama tidak melaut. Umumnya istri membantu suami bekerja

dengan berdagang atau membuka usaha warung kecil-kecilan di rumah.

Responden ada yang beternak kambing atau sapi, meskipun jumlahnya tidak banyak. Menurut penuturan salah satu responden, mereka memelihara kambing atau sapi untuk berjaga-jaga apabila suatu ketika membutuhkan biaya untuk membeli peralatan mencari ikan, seperti mesin tempel atau membeli perahu baru untuk mengganti perahu lama yang sudah rusak. Harga satu buah perahu berkisar antara lima juta rupiah, sehingga kalau tidak memiliki cadangan uang, mereka harus pinjam ke koperasi atau rentenir. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzan (2011), bahwa partisipasi istri dalam mendukung pekerjaan suami selain diwujudkan dengan bekerja di sektor perikanan, yaitu mengelola ikan hasil tangkapan suami juga bekerja di luar sektor perikanan.

Kondisi Kepemilikan Rumah: Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tidak semua keluarga nelayan mampu mengadakan. Tabel 4 berikut merupakan kondisi kepemilikan rumah tinggal nelayan responden.

Tabel 4
Kepemilikan Rumah

No	Kepemilikan Rumah	f	persen
1	Milik sendiri	15	50.00
2	Numpang orangtua/ mertua	10	33.33
3	Sewa/kontrak	5	16,67
Jumlah		30	100,00

Sumber: Jawaban responden (N=30)

Data pada tabel 5 menunjukkan, bahwa 15 orang (50 persen) menyatakan rumah tinggal milik sendiri, merupakan warisan orang tua atau bantuan dari saudara yang merantau dan hidupnya berhasil. Secara tradisi apabila ada saudara yang merantau dan hidupnya sukses, akan membantu keluarga besar yang masih tinggal di tempat kelahiran secara sukarela. Sebanyak 10 orang (33,33 persen) menyatakan masih

menumpang orang tua atau mertua, umumnya mereka adalah keluarga baru yang belum bisa memiliki rumah sendiri. Nelayan yang masih belum memiliki tempat tinggal ada yang memanfaatkan rumah keluarga yang tidak dipakai. Hal ini dituturkan oleh salah seorang responden nelayan yang menyatakan, bahwa mereka tidak memiliki rumah tempat tinggal tetapi ada kerabat yang berbaik hati dan mengizinkan rumahnya ditempati tanpa menyewa. Responden tersebut hanya disuruh menempati, menjaga dan merawat rumah tersebut, apabila sewaktu-waktu diminta harus bersedia untuk pindah. Kondisi rumah juga bisa menggambarkan keberadaan keluarga nelayan miskin, tabel 5 berikut menggambarkan kondisi rumah keluarga nelayan responden.

Tabel 5
Kondisi Rumah Nelayan

No	Kondisi Rumah	f	persen
1	Permanen	20	66,67
2	Semi Permanen	8	26,67
3	Tidak permanen	2	6,66
Jumlah		30	100,00

Sumber: Jawaban responden (N=30)

Hasil pengumpulan data menunjukkan, bahwa umumnya kondisi rumah yang dimiliki nelayan di Padang Pariaman dalam kondisi baik, 66,67 persen menyatakan kondisi rumah permanen, terbuat dari tembok yang kokoh dan bahan yang cukup baik, ada yang temboknya dari batu bata dan semen. Delapan orang (26,67 persen) menyatakan kondisi rumah mereka semi permanen, bentuk bangunannya terbuat dari papan dan semen. Kondisi rumah yang tidak permanen bentuk bangunannya dari papan, lantai dari tanah atau papan.

Kesehatan: Tidak jarang responden mengalami sakit, berbagai cara pengobatan yang dilakukan masyarakat nelayan ketika mengalami sakit, tersaji dalam tabel 6 berikut.

Tabel 6
Cara Berobat Nelayan Saat Sakit

No	Pola Berobat	f	persen
1	Beli di kios/ warung/toko obat	4	13,33
2	Puskesmas	21	70
4	Mantri kesehatan	3	10
3	Dokter umum	2	6,67
Jumlah		30	100,00

Sumber: Jawaban responden (N=30)

Data pada tabel 6 terlihat bahwa sebagian besar nelayan responden di Padang Pariaman apabila sakit berobat di Puskesmas 21 orang (70 persen), nelayan sudah mengetahui manfaat dan keberadaan Puskesmas sebagai tempat rujukan awal apabila sakit, karena selain pelayanan bagus, biaya murah dan terjangkau. Namun masih ada beberapa responden memilih berobat dengan membeli di warung, karena sakit yang diderita ringan, sehingga cukup diobati sendiri tanpa harus ke Puskesmas. Sisanya, responden memanfaatkan jasa dokter umum dan mantri kesehatan.

Pemenuhan Kebutuhan Makan: Pola konsumsi yang dilakukan nelayan responden, dapat dilihat pada tabel 7 berikut.

Tabel 7
Frekuensi Makan Dalam Sehari

No	Frekuensi Makan	F	persen
1	Satu kali	-	0
2	Dua kali	10	33,33
3	Tiga kali	20	66,67
Jumlah		30	100,00

Sumber: Jawaban responden (N=30)

Data pada tabel 7 menunjukkan, bahwa nelayan Padang Pariaman pada umumnya makan tiga kali sehari, 20 responden atau 66,67 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan makan sehari-hari keluarga nelayan sudah cukup, walaupun kualitas masih sederhana bahkan mungkin terkadang belum memenuhi empat sehat lima sempurna. Mereka terkadang makan dengan lauk dan sayur seadanya tanpa tambahan buah-buahan, yang terpenting bagi mereka perut

kenyang sehingga memiliki tenaga yang kuat dan dapat bekerja di laut. Responden yang makan dua kali, biasanya ditambah dengan minum kopi, untuk menambah kebugaran ketika melaut dan tidak cepat mengantuk.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan mayoritas nelayan Padang Pariaman dalam kondisi miskin. Hasil wawancara mendalam dengan keluarga nelayan terungkap, bahwa ada beberapa permasalahan dasar nelayan miskin baik secara alamiah, struktural, maupun kultural.

Kondisi alam, faktor yang menentukan bisa dan tidaknya nelayan pergi melaut untuk bisa mencari ikan. Masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya mencari ikan. Gelombang tinggi, angin kencang atau badai, dan sedikitnya ikan serta rusaknya alam akan mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Seperti yang diutarakan salah satu nelayan di Daerah Ulakan, "... yaa mas, kita sudah dua bulan lebih tidak melaut, karena kondisi alam yang tidak memungkinkan, gelombang tinggi sehingga kita tidak berani melaut..."

Pendapat tersebut dipertegas oleh nelayan lain sambil menunjuk nelayan yang baru saja lewat di sekitar wawancara dilakukan, "Itu tadi baru saja gagal melaut, kembali lagi mendarat karena kondisi cuaca tidak baik. Kita dalam sebulan hanya 20 hari kerja Mas..." Hasil wawancara tersebut dibenarkan oleh petugas PPL yang mendampingi peneliti, "Jumlah tangkapan ikan sangat ditentukan oleh cuaca atau kondisi alam. Apabila kondisi itu secara terus-menerus tidak menentu, maka mempengaruhi penghasilan para nelayan, padahal menjadi nelayan merupakan merupakan mata pencaharian utama masyarakat di wilayah ini...." Kendala alam juga disampaikan oleh responden lain, "Kalau kondisi alam tidak menentu seperti saat ini kemungkinan besar ikan-ikan akan semakin berkurang...."

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi alam yang tidak menentu menjadi kendala utama nelayan untuk bisa mencari ikan di laut. Oleh karena itu, sangatlah wajar nelayan

di lokasi penelitian mengeluhkan hasil tangkapan ikan yang sangat minim akibat cuaca yang terus mengalami perubahan, sehingga menyebabkan nelayan tidak mendapatkan penghasilan (paceklik). Musim paceklik yang selalu datang setiap tahun dengan intensitas waktu yang cukup lama dan sulit diprediksikan, semakin membuat masyarakat nelayan terus berada dalam lingkaran setan kemiskinan. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan bergantung terhadap keadaan alam sekitar sehingga alam merupakan sumber kehidupan mereka.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), masyarakat nelayan sasaran penelitian umumnya merupakan nelayan tradisional yang tergolong berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa rendahnya tingkat pendidikan penduduk disebabkan oleh beberapa hal: Biaya pendidikan, dirasa cukup tinggi. Pemerintah telah memberikan layanan gratis di bidang pendidikan tetapi untuk biaya transport masih dirasa cukup berat. Tidak ada keinginan untuk berubah. Kualitas sumber daya manusia yang rendah merupakan ciri umum nelayan tradisional di berbagai wilayah Indonesia. Sumber daya manusia dinilai dari aspek pendidikan umumnya masih rendah, terbukti dari hasil penelitian ditemukan dari 30 responden, 22 orang (73,3 persen) berpendidikan SD dan SMP.

Masyarakat di pesisir Kabupaten Padang Pariaman menganggap bahwa nelayan merupakan pekerjaan warisan nenek moyang yang memberi penghidupan mereka, walaupun hasilnya pas-pasan. Keterampilan melaut menjadi warisan yang sudah mereka pelajari dari orang tua secara turun temurun, tanpa memerlukan ijazah sebagai syarat untuk menjadi nelayan. Kondisi ini mengakibatkan anak-anak nelayan malas untuk bersekolah dan lebih banyak waktunya digunakan untuk membantu orang tua melaut. Seperti yang diutarakan oleh responden yang menyatakan, "Untuk menjadi nelayan tidak perlu syarat, Mas yang penting berani dan bisa ke laut menangkap ikan." Pendapat ini juga disampaikan oleh nelayan lain. "Kami menjadi

nelayan sejak kecil mas, dulu sambil sekolah saya juga membantu orang tua untuk mencari ikan, pagi-pagi sekali pergi melaut bersama ayah, kalau siang sekolah.”

Kesulitan ekonomi tidak memberi kesempatan bagi rumah tangga nelayan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak mereka. Banyak anak yang harus membantu orang tua bekerja mencari ikan di laut setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Mereka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena terkendala biaya. Kondisi ini menyebabkan kualitas sumber daya manusia rendah, kemampuan nelayan menjadi rendah, akibat selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat produktivitas hasil tangkapan ikan yang juga minim. Dengan kondisi tersebut, yang terlintas dalam benak nelayan adalah bisa bertahan hidup, yang penting ada uang untuk membeli kebutuhan makan keluarga. Secara psikologis, mereka cepat puas dengan yang diperolehnya, mereka tidak tertarik segala macam aturan, himbauan, termasuk program pemberdayaan pemerintah atau lembaga-lembaga formal peduli nelayan.

Budaya hidup boros. Budaya hidup konsumtif menjadi permasalahan dasar bagi nelayan karena mereka senang membelanjakan uangnya untuk hal yang kurang bermanfaat. Pada saat penghasilan banyak, nelayan menghabiskan uangnya untuk membeli kebutuhan sekunder dan tidak menyisihkan sedikit pun penghasilannya untuk ditabung sebagai cadangan atau berjaga-jaga ketika musim paceklik tiba. Kenyataan tersebut dibenarkan oleh petugas PPL yang menyatakan, “Ya, Mas, kebiasaan nelayan di daerah sini suka hidup boros, kalau ada duit banyak, uang dihambur-hamburkan, termasuk untuk judi meski hanya kecil-kecilan, mereka biasa *nongkrong* di warung-warung dekat pantai ketika tidak melaut, dan melakukan permainan dengan taruhan uang, yah semacam judilah.”

Salah satu responden mendukung pernyataan tersebut dengan menyatakan, “Pola hidup masyarakat nelayan ini boros, Mas tidak punya tabungan, setiap hasil penjualan dari laut habis untuk kebutuhan di saat itu juga.” Menurut ketua

kelompok nelayan di wilayah tersebut, banyak nelayan yang belum bisa mengelola keuangan keluarga, dengan tegas dia menyatakan bahwa, “Nelayan di sini masih belum tahu tentang manajemen keuangan, Mas belum tahu bagaimana mengelola keuangan keluarga, sehingga tidak punya tabungan dan tidak punya usaha lain.” Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pola hidup nelayan sendiri boros dan malas sehingga menyebabkan kemiskinan, mereka menghabiskan uang ketika mendapat penghasilan lebih dan tidak menabung untuk masa depan, minimal untuk cadangan ketika kondisi paceklik, menyebabkan posisi tawar nelayan semakin lemah, sulit keluar dari kemiskinan. Akibatnya, nelayan tidak dapat memberdayakan dirinya, buruk dalam mengelola keuangan secara hemat, budaya ini sulit dilepaskan dari pola pikir yang berkembang di masyarakat nelayan sasaran penelitian.

Keterbatasan modal. Nelayan adalah termasuk warga masyarakat yang tergolong kondisi ekonominya lemah, tidak berkembangnya nelayan tradisional secara optimal karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan akses modal yang terbatas, baik modal usaha maupun modal berinvestasi. Terkait pengetahuan dan keterampilan, nelayan miskin umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Apalagi untuk kebutuhan modal, usaha penangkapan ikan membutuhkan modal yang tidak sedikit, untuk membeli satu perahu butuh modal lima juta rupiah, belum untuk biaya operasional bahan bakar. Hal tersebut diutarakan oleh salah satu responden yang mengatakan, “Untuk membeli kapal saja bisa sampai lima juta mas, itu baru kapalnya dan belum mesinnya, dan kapal yang kita gunakan juga tidak tahan lama perlu diperbaiki. Mesin kapal kadang hanya bertahan satu tahun apalagi kalau tidak dirawat, cepet rusak.”

Kondisi kurang modal tersebut menyebabkan nelayan di Padang Pariaman belum bisa optimal dalam menangkap hasil laut. Kapal yang sederhana dan penangkapan tradisional menjadi salah satu penyebabnya, karena modal sedikit dan terbatas menyebabkan hasil tangkapan ikan

juga terbatas, sesuai dengan alat yang mereka miliki. Apabila ada bantuan modal, nelayan dapat memperbaiki dan meningkatkan peralatan yang digunakan sehingga hasil tangkapan juga semakin melimpah.

Program pemerintah tidak memihak nelayan. Pemerintah telah banyak meluncurkan program pengentasan kemiskinan termasuk bagi masyarakat nelayan, memberi bantuan peralatan untuk nelayan, tetapi bantuan sifatnya *top down* sehingga mengakibatkan alat bantu tidak tepat sasaran dan menjadi tidak efektif. Seperti diungkapkan oleh salah satu responden yang menyatakan, “Kita pernah dapat bantuan, Mas pelatihan budidaya ikan, tapi ikan air tawar. Yaa, kita ikuti saja Mas program tersebut, walaupun tidak sesuai dengan kebutuhan kita.”

Ketidaksesuaian bantuan atau program yang diberikan kepada nelayan miskin akhirnya tidak berdampak positif dan optimal bagi upaya pengentasan kemiskinan nelayan. Seharusnya, jenis bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan nelayan melalui dialog dengan nelayan, tidak semata-mata ditentukan dari atas. Nelayan seharusnya diposisikan sebagai subjek bukan objek dalam pembangunan, sehingga jenis bantuan yang diberikan betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan nelayan.

D. Analisis Kebutuhan Pelayanan Sosial bagi Nelayan Miskin

Hasil penelitian menunjukkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan mayoritas nelayan di Padang Pariaman masih dalam kondisi miskin. Kondisi alam berupa gelombang tinggi, angin kencang atau badai, dan sedikitnya ikan serta rusaknya alam mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Kondisi ini menjadikan nelayan hidup dalam suasana alam yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya mencari ikan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dikarenakan mereka adalah nelayan tradisional yang tergolong masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Hal ini sesuai pendapat Suharto, bahwa rendahnya sumber daya manusia (SDM) dan peralatan

yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan. (Suharto, 2005).

Kondisi lain yang turut mempengaruhi kemiskinan nelayan adalah kebiasaan atau pola hidup boros. Mereka bergaya hidup konsumtif menjadi permasalahan dasar bagi nelayan karena mereka senang membelanjakan uangnya untuk hal yang kurang bermanfaat. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Rahmattullah, bahwa nelayan melakukan pola hidup konsumtif, pada saat penghasilan banyak dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder dan tidak ditabung untuk persiapan apabila terjadi paceklik. Ketika benar-benar terjadi paceklik, mereka berhutang termasuk kepada lintah darat, semakin memperberat kehidupan nelayan. Gambaran tersebut merupakan pusaran masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan umumnya di Indonesia (Rahmattullah, 2010).

Keterbatasan modal, baik modal berusaha maupun berinvestasi juga menjadi penyebab nelayan hidup dalam kemiskinan. Sejalan dengan hasil penelitian Sujarno (2008) yang menemukan, bahwa peningkatan pendapatan nelayan dipengaruhi oleh modal kerja, jumlah tenaga kerja, pengalaman dan jarak tempuh melaut. Modal kerja mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan nelayan. Program pemerintah belum optimal memihak nelayan, bantuan peralatan untuk nelayan sifatnya *top down*, sehingga mengakibatkan alat bantu tidak tepat sasaran dan menjadi tidak efektif.

Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Pemberdayaan yang dilakukan untuk mengentaskan nelayan miskin melalui pelayanan sosial merupakan suatu kegiatan yang diberikan seseorang atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Pelayanan sosial merupakan

suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhannya, yang dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Pelayanan sosial dalam arti luas adalah setiap pelayanan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia, sedangkan dalam arti sempit ialah pelayanan yang diberikan kepada sebagian masyarakat yang kurang atau tidak beruntung (Dwi Heru Sukoco, 1991). Pelayanan sosial dalam arti sempit disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung, seperti pelayanan sosial bagi anak yang terlantar, keluarga miskin, cacat, dan nelayan.

Pelayanan yang diberikan belum secara optimal diterima oleh nelayan, sehingga perlu diberikan pelayanan melalui pendampingan sosial, salah satu strategi dalam pelayanan sosial. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri, pendampingan terhadap klien merupakan partisipasi nyata sebagai wujud kepedulian terhadap mereka. Pendamping sosial hadir sebagai agen peubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi klien. Dalam pengentasan nelayan miskin peranan seorang pekerja sosial diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai pemecah masalah secara langsung tanpa melibatkan masyarakat. Pendampingan sosial dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara klien dan pekerja sosial untuk secara bersama menghadapi beragam masalah yang dihadapi klien (Suharto, 2005).

Hal ini sesuai kondisi nelayan yang mengalami permasalahan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), kebiasaan atau pola hidup boros, keterbatasan modal baik modal untuk usaha maupun modal untuk berinvestasi, dan program pemerintah belum optimal memihak nelayan. Pendampingan sosial merupakan suatu

strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk mendampingi masyarakat agar bisa mandiri dan keluar dari zona kemiskinan dengan menekankan partisipasi penuh dari masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau untuk memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Dalam pengentasan nelayan miskin peranan seorang pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai pemecah masalah secara langsung tanpa melibatkan masyarakat. Keluarga nelayan miskin di Padang Pariaman secara pendidikan masih relatif rendah sehingga sosok pendamping bagi mereka menjadi penting (Ihwan Sudrajat, 2002). Salah satu nelayan responden mengemukakan, “Ya, Pak kita butuh pendamping bagi warga nelayan sini. Biar bisa membantu kami, membantu kami memecahkan masalah-masalah yang kami hadapi.”

Pernyataan tersebut dipertegas oleh salah satu pendamping dari dinas kelautan dan perikanan, “Saya mendampingi masyarakat nelayan ini mas, kalau ada program pemerintah saya memberikan informasi bagi warga sini, setiap hari saya berada disini, kalau ada tamu saya juga berusaha untuk mendampingi.” Responden lain mendukung dengan menyatakan, “Pernah ada komunitas, mereka membentuk kelompok 15 orang, akhirnya apa yang dibutuhkan mereka ungkapkan, dan didampingi untuk membuat proposal pengajuan dana sesuai dengan kebutuhan, dan akhirnya cair dan dibelanjakan, untuk program saat itu berhasil tapi lama kelamaan hilang setelah tidak didampingi lagi, sehingga perlu pendampingan terus.” Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa nelayan memerlukan sosok pendamping yang bisa memberi pendampingan bagi mereka untuk bersama memecahkan segala permasalahan, baik masalah dalam upaya meningkatkan usaha maupun masalah keluarga (pendamping

keluarga), tidak hanya pendampingan sementara tetapi mendampingi sampai masyarakat bisa mandiri.

Dari hasil penelitian juga teridentifikasi berbagai kebutuhan yang muncul dari aspirasi masyarakat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada, kebutuhan pelayanan dan pendampingan sosial bagi nelayan miskin dapat dikategorikan menjadi empat:

(1) Pelatihan dan motivasi, kinerja nelayan diharapkan meningkat apabila mendapat dukungan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat nelayan, karena kebijakan implementasi program pembangunan masyarakat di kawasan pesisir sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, belum optimal.

Program peningkatan motivasi bagi nelayan sangat diperlukan untuk memberi wawasan dan motivasi kepada masyarakat nelayan di Padang Pariaman, menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta menjaga keberlangsungan proses regenerasi dan eksistensi nelayan. Masalah budaya, karakter, sikap dari nelayan yang cenderung hidupnya santai, boros dan senang berfoya-foya menjadi karakter nelayan yang perlu diubah. Gambaran yang terjadi dilapangan juga terkait masalah kompetensi nelayan yang didalamnya terkandung unsur keterampilan, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki nelayan. Kemampuan dan keterampilan untuk menjadi seorang nelayan merupakan suatu keahlian yang sudah mereka peroleh secara turun menurun, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang responden. “Kita menjadi nelayan karena warisan orang tua, jadi kita sudah terbiasa berlayar tanpa harus belajar.”

Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki tersebut kemungkinan belum memenuhi standar seorang nelayan, sehingga berdampak pada hasil tangkapan. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi guna meningkatkan kapabilitas nelayan dalam kinerjanya. Penyebab masalah yang terkait dengan SDM nelayan adalah masalah pendidikan, rata-rata tingkat pendidikan nelayan adalah SD dan tentunya menjadi hal yang sulit

untuk ditingkatkan. Program pelatihan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan nelayan dan dapat diperuntukkan bagi istri atau anak nelayan. Bentuk pelatihan tersebut antara lain, mengolah ikan pada saat panen melimpah sehingga ikan tidak cepat busuk dan tidak terbuang percuma, pelatihan menjahit, pelatihan membuat kerajinan tangan, dengan memanfaatkan potensi setempat. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang responden istri nelayan, “Perlu pelatihan bagi kami mas, agar bisa menjahit atau merajut untuk menambah penghasilan.”

Pernyataan tersebut didukung oleh responden lain, “Pelatihan untuk membuat kerajinan tangan sudah ada tapi baru satu orang, semacam keranjang tempat untuk menjual kacang, bisa dikembangkan disini bu sehingga semua ibu-ibu bisa ikut pelatihan.” Pendapat serupa juga diutarakan oleh responden lainnya, “Pelatihan-pelatihan bagi keluarga nelayan, seperti menjahit, istilahnya itu multi profesi, kalau bapaknya melaut ibunya bisa memiliki keterampilan lain, yang pada dasarnya untuk meningkatkan penghasilan keluarga.” Kesimpulan dari wawancara tersebut pemerintah atau pihak terkait bisa memberi pelatihan kepada keluarga nelayan, sehingga bisa punya hasil tambahan dari keterampilan yang mereka dapatkan selain dari hasil nelayan.

(2) Penyuluhan Manajemen Keuangan Usaha Skala Mikro Bidang Perikanan: bertujuan untuk meningkatkan motivasi serta keterampilan peserta dalam manajemen keuangan usaha skala mikro, juga dapat memberi solusi bagi peserta dalam menghadapi permasalahan usahanya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden yang menyebutkan pentingnya penyuluhan manajemen, “Penyuluhan manajemen keuangan pak, bagaimana cara mengelola keuangan agar nelayan tidak boros.” Pernyataan tersebut dipertegas pendapat responden lain, “Penyuluhan-penyuluhan untuk bisa mengolah keuangan mandiri bagi nelayan.”

Nelayan, ketika mendapat penghasilan lebih sering dibelanjakan untuk kebutuhan yang tidak penting, tidak memikirkan untuk kehidupan selanjutnya, bukan soal besar atau

kecilnya pendapatan yang diterima, melainkan membelanjakan uang yang ada secara terarah sesuai dengan peruntukkan berdasarkan skala prioritas. Jika tidak dikelola dengan baik, akan melahirkan masyarakat yang cenderung melahirkan kebiasaan “gali lobang tutup lobang”. Hidup selalu kurang dan kurang lagi, meskipun nominal pendapatan telah mengalami peningkatan.

Pelatihan diharapkan semua peserta memiliki kesadaran, pola pikir dan sikap hidup yang konstruktif terutama dalam hal pemanfaatan pendapatan, dan mampu menggunakan sesuai alokasi dan peruntukan skala prioritas, mampu bekerja secara produktif, dapat mengatur keuangan dengan baik, bahkan bisa menabung untuk kebutuhan masa depan. Pendampingan intensif akan mempraktikkan nelayan langsung pengetahuan terkait pengelolaan keuangan rumah tangga.

(3) Permodalan: Nelayan di Padang Pariaman merupakan nelayan miskin yang tidak memiliki modal besar untuk meningkatkan usahanya, mereka adalah nelayan tradisional. “Kita butuh modal mas untuk membeli mesin yang mahal harganya, kalau tidak ya kita hanya menggunakan mesin seadanya kurang kuat, mudah macet, kalau sudah gitu hasil tangkapan juga sedikit.” Keterbatasan modal bagi nelayan merupakan permasalahan mendasar, campur tangan pemerintah dalam pemberian pinjaman modal bunga lunak belum juga memberi solusi. Ada ketidakberanian nelayan untuk meminjam modal ke bank karena mereka takut tidak bisa mengembalikan. “Kita masih takut mas, kalau berhutang dalam jumlah besar, takut ga bisa mengembalikan, untuk makan aja susah apalagi untuk mengembalikan hutang.”

Dalam pelaksanaan program sangat dibutuhkan strategi dan sistem yang fleksibel agar berjalan efisien dan efektif. Hal ini bertujuan agar sumber dana yang dikeluarkan dapat berdaya guna dan tepat sasaran, agar tujuan program tercapai. Hasil kajian tersebut membuktikan bahwa kehidupan nelayan Padang Pariaman umumnya berada dalam kondisi miskin oleh berbagai faktor, seperti kondisi alam, rendahnya

kualitas SDM, budaya boros, keterbatasan modal dan program pemerintah yang tidak berpihak pada nelayan. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Mubyarto dkk (1984, 1988), bahwa nelayan miskin memiliki ketidakberdayaan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik, di tiap-tiap daerah.

E. Penutup

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional sehingga pendekatan untuk mengentaskan kemiskinan juga harus multidimensional. Mengatasi kemiskinan nelayan sebaiknya harus diawali dengan adanya analisis penyebab kemiskinan, selanjutnya menganalisis kebutuhan yang menjadi prioritas untuk keluar dari zona kemiskinan. Cara atau metode untuk menangulangnya lebih terfokus dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan miskin. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa gambaran umum kondisi keluarga nelayan miskin di Padang Pariaman dilihat dari pendapatan, rerata masih berada di bawah upah minimum regional kabupaten atau di bawah Rp 1.630.000,-. Jumlah tanggungan keluarga responden nelayan mayoritas lebih dari tiga orang, bahkan dijumpai beberapa anak yang sudah menikah masih tinggal bersama orang tua atau mertuanya. Tingkat pendidikan responden nelayan mayoritas SD/ sederajatnya. Guna membantu kecukupan kebutuhan keluarga, isteri nelayan ikut bekerja dengan membuka warung kecil-kecilan di rumah. Sebagian besar responden memiliki rumah sendiri dan ada yang numpang di rumah orang tua atau mertua. Bagi yang rumahnya milik sendiri umumnya diperoleh dari warisan orang tua. Kondisi rumah nelayan sebagian ada yang permanen dan sebagian semi permanen. Berkait dengan layanan kesehatan, sebagian besar responden memanfaatkan fasilitas Puskesmas untuk berobat ketika sakit, sebagian lain berobat ke dokter umum atau mantri kesehatan. Kebutuhan makan responden cukup, sebagian makan tiga kali sehari, sedang yang biasa makan dua kali sehari ditambah minum kopi untuk menahan kantuk ketika sedang melaut. Rendahnya pendapatan, tingkat pendidikan kelu-

arga nelayan, dan banyaknya jumlah tanggungan keluarga menjadikan nelayan hidup miskin.

Pelayanan dan pendampingan sosial dibutuhkan bagi nelayan miskin agar dapat terentaskan dari kemiskinan, dilakukan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat nelayan, agar mampu memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber potensi yang ada. Berbagai pelayanan dan pendampingan sosial yang dibutuhkan keluarga nelayan antara lain pelatihan dan motivasi bagi nelayan dan keluarga agar mereka memiliki wawasan dan pengetahuan lebih luas, serta tumbuh jiwa kewirausahaan. Penyuluhan manajemen keuangan agar dapat mengelola keuangan keluarga termasuk membiasakan budaya menabung. Pemberian bantuan modal dan pendampingan agar nelayan memiliki keberanian untuk mencari tambahan modal dan berani mengembangkan usaha serta bertanggung jawab.

Berdasar hasil temuan tersebut maka perlu peningkatan pendidikan dan kualitas SDM keluarga nelayan, selain pendidikan formal bagi anak-anak nelayan juga melalui pemberian keterampilan tambahan bagi keluarga nelayan. Mengubah pola kehidupan keluarga nelayan melalui pelatihan manajemen keuangan agar dapat mengelola keuangan dengan baik, tidak boros dan gemar menabung. Kebijakan pemerintah diharapkan berpihak pada kepentingan nelayan, bersifat *bottom up* sesuai kondisi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat nelayan, agar kesejahteraan masyarakat nelayan meningkat. Kementerian Sosial agar lebih mengoptimalkan peran penyuluh sosial untuk memberi penyuluhan dan pelayanan sosial kepada nelayan dan keluarganya, dengan memberi berbagai macam keterampilan tambahan yang bisa meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan keluarga nelayan. Sebagai pendamping, penyuluh sosial diharapkan selalu memberikan motivasi kepada nelayan untuk tetap memiliki semangat hidup, mau berusaha dan belajar agar pengetahuannya bertambah, sehingga kualitas sumber daya keluarga nelayan semakin meningkat, pendapatan sebagai nelayan juga bertambah. Pelayanan

sosial diberikan agar nelayan dapat menggali segala potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di lingkungannya dan dapat didayagunakan sehingga kualitas dan kesejahteraan hidup keluarga nelayan juga semakin meningkatkan.

Pustaka Acuan

- Ahmad Fauzan Mubarak. (2011). *Analisis Pendapatan dan Strategi Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pandega di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Asmadi Alsa. (2007). *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- BPS. (2008). *Garis Kemiskinan Menurut Provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Dwi Heru Sukoco. (1991). *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*. Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS
- Iriani. (2001). *Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan*. Padang: Depdikbudpar
- Ihwan Sudrajat. (2002). *Membangkitkan Kekuatan Ekonomi Nelayan*. Suara Merdeka. 13 Desember 2002
- Kusnadi. (2002). *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKIS.
- Muhamad Badiran. (2009). *Kajian Model Pendidikan untuk Anak Masyarakat Nelayan di Sumatera*. Ikatan Pengembang Teknologi Pendidikan Indonesia.
- Moleong. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mubyarto. Loekman Soetrisno dan Michael R. Dove. (1984). *Nelayan dan Kemiskinan Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*. Jakarta: Rajawali.
- Mubyarto dan Loekman Soetrisno. (1988). *Studi Pengembangan Desa Pantai di Provinsi Riau. Pusat Pembangunan Pedesaan dan Kawasan*. Yogyakarta: UGM.
- Rahmatullah. (2010). *Menanggulangi Masalah Kemiskinan*. www.Rahmatullah.net
- Rajabali Akbar. (2015). *Strategi Pemberdayaan Nelayan Miskin*. www. Kompasiana
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cetakan 38. Jakarta: Grafindo Persada.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- . (2007). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Public*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarno. (2008). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kabupaten Langkat*. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana. Medan: Universitas Sumatera Utara.

